



Belanja Pegawai Badung

Jadi Rp 1,2 T

Jika dibandingkan belanja pegawai tahun 2015, naik sebesar Rp 97,9 miliar atau sekitar 8,27 persen. Padahal dalam aturan disebut kenaikan belanja pegawai hanya 5-7 persen.

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung merancang menaikkan gaji pegawai pada 2016 mendatang. Tak tanggung-tanggung kenaikannya hampir mencapai Rp 100 miliar. Pemerintah beralih kenaikan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan para pegawai.

Dari data yang diperoleh, Minggu (2/8), pada 2016, untuk gaji pegawai yang masuk dalam pos belanja pegawai di Kabupaten

Badung dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun lebih, persisnya Rp 1.282.788.915.634. Jumlah itu naik Rp 97,9 miliar, dibandingkan anggaran tahun 2015 sebesar Rp 1.184.855.507.550.

Kabag Keuangan Pemkab Badung Ketut Gede Suyasa menyatakan, kenaikan belanja pegawai di Kabupaten Badung tahun 2016 sebesar 8,27 persen. Tetapi, menaikkan belanja pegawai tidak secara

serampangan begitu saja, mengingat ada aturan pemerintah yang jadi landasan. Seperti Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

"Jadi semua ini ada aturannya. Tujuannya meningkatkan kinerja sekaligus peningkatan kesejahteraan pegawai," papar Suyasa.

Aturan menyebutkan kenaikan belanja pegawai hanya 5 sampai 7 persen, kenapa di Badung sampai 8,27 persen? "Kenaikan sebesar 8,27 persen karena termasuk gaji ke-13 PNS. Maka terlihat cukup besar," jelasnya.

Pada bagian lain, Sekkab Badung Kompyang R Swandika menegaskan, pemerintah menaikkan belanja pegawai karena

pemerintah ingin membuat pegawai lebih sejahtera. Diharapkan dengan kenaikan tersebut maka berpengaruh pada kualitas kinerja para pegawai.

Pejabat asal Kerobokan tersebut menambahkan sudah ada kajian kenaikan belanja pegawai tersebut dan aturannya pun sudah jelas. "Yang jelas kajian untuk belanja pegawai ini sudah kami lakukan. Semuanya mengikuti arahan dan aturan pusat," tegas Swandika.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria, menilai kenaikan gaji pegawai terutama pegawai yang berstatus PNS sudah pantas diberikan. Karena ini juga untuk demi kesejahteraan pegawai di Kabupaten Badung. Untuk itu, pihaknya men-

dukung kebijakan pemerintah tersebut.

"Dari sisi pendapatan tahun 2015 ini kita cukup tinggi. Untuk itu sudah sepatutnya mereka dihargai lebih dengan kebijakan bupati ini. Apalagi sudah disesuaikan oleh Permendagri," kata politisi asal Mengwi, tersebut. Satria pun memberikan catatan khusus terkait masalah kepegawaian, karena sampai saat ini banyak pegawai yang pensiun, namun di sisi lain tidak ada penambahan pegawai. Alhasil membuat beban kerja pegawai bertambah. Karena itu, dia menyebut pantaskah bila pegawai diberikan penghargaan dengan menaikkan gajinya, karena tak jarang pegawai itu harus lembur dalam menyelesaikan tugas. **as**

Edisi : Senin, 3 Agustus 2015

Hal : 4



Dugaan Penyimpangan PHR Badung Dua Mantan Kabiro ✓ Keuangan Pemprov Bali Akan Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan PHR (Pajak Hotel dan Restoran) Pemkab Badung yang dibagikan ke enam kabupaten se-Bali membidik pejabat Pemprov Bali. Senin (3/8) ini, penyidik berencana melakukan pemeriksaan terhadap dua mantan Kabiro Keuangan Pemprov Bali.

Penyidik yang mulai mengarahkan bidikannya ke Pemprov Bali ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Pemprov Bali merupakan mediator dalam pembagian dana PHR dari Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar ke enam kabupaten di Bali. Tidak hanya itu, dalam pemeriksaan pejabat di Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali juga ditemukan adanya dana pembagian PHR yang masih mengendap di rekening.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan enggan berkomentar terkait penyelidikan yang mulai mengarah ke Pemprov Bali. Namun Ashari membenarkan penyidik yang akan kembali memeriksa

dua mantan Kabiro Keuangan Pemprov Bali pada Senin ini. "Dua mantan Kabiro Keuangan ini diperiksa sebagai saksi. Nanti namanya akan kami informasikan," jelasnya pada Minggu (2/8).

Dalam kasus penyimpangan PHR ini, penyidik sudah memeriksa beberapa saksi kunci. Di antaranya, Kadispenda Badung, Wayan Adi Arnawa, Kadispenda Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi, Kadispenda Bali Wayan Suarjana, yang saat ini menjabat Sekwan DPRD Bali. Selain itu, beberapa pejabat yang menerima dana PHR di daerah juga telah diperiksa diantaranya Kabag Keuangan Bangli, Tabanan dan Klungkung.

Kasus ini berawal dari kicauan anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana yang mengatakan ada penyimpangan dalam pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali. Ia mengungkapkan, pembagian PHR di Badung tidak sesuai dengan peruntukan. rez

Edisi : Senin, 3 Agustus 2015

Hal : 3



Penyertaan Modal Rp 217 Miliar Jadi Sorotan

DENPASAR, NusaBali

Dana berlabel 'penyertaan modal' sebesar Rp 217 miliar yang dipasang untuk pos pembentukan PT Karangasem Sejahtera dalam Ranperda APBD Karangasem, menuai sorotan. Pasalnya, 20 persen dari Rp 217 miliar

atau sekitar Rp 43,4 miliar dicuragi akan dimainkan sebagai amunisi untuk kepentingan politik Pilkada Karangasem 2015.

Ranperda APBD Perubahan berisi penyertaan modal Rp 217 miliar untuk pembentukan PT Karangasem

Sejahtera (PT KS) tersebut rencananya akan diparipurnakan di DPRD Karangasem, Selasa (4/8) besok. Dana penyertaan modal Rp 217 miliar itu dirancang eksekutif pada masa pemer-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Penyertaan Modal Rp 217 Miliar Jadi Sorotan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

intahan Bupati-Wakil Bupati Karangasem Wayan Geredeg-Made Sukerana, yang telah mengakhiri masa jabatannya per 21 Juli 2015 lalu.

Sebelum Ranperda APBD Perubahan diparipurnakan, DPRD Karangasem, masalah dana penyertaan Rp 217 miliar untuk PT KS menjadi sorotan dan bahan perdebatan. Sejumlah elite dan kader PDIP disebut-sebut 'berontak' atas pemasangan dana penyertaan modal tersebut. Mereka berharap Fraksi PDIP DPRD Karangasem bertindak dan tidak menyetujui item penyertaan modal untuk PT KS tersebut.

Sumber NusaBali di lingkaran PDIP menyebutkan, penyertaan modal sebesar Rp 217 miliar untuk PT KS itu sudah rancangan lama, namun baru akan diketok palu dalam rapat paripurna DPRD Karangasem, Selasa besok. Diharapkan, dananya sudah cair bulan Desember 2015, saat masa Pilkada Karangasem.

"Penjabat Bupati Karangasem (Ida Bagus Ngurah Arda yang ditunjuk gantikan Wayan Geredeg Red) harus hati-hati ini," ujar sumber NusaBali di PDIP, Minggu

(2/8). "Karena tidak semuanya masuk ke penyertaan modal, yakni hanya 80 persen saja," ujar sumber tadi.

Sedangkan 20 persennya lagi yakni sekitar Rp 43,4 miliar, lanjut dia, tidak jelas dikelola siapa. "Ini yang kita khawatirkan, 20 persen dari Rp 217 miliar itu untuk apa? Bisa-bisa ada kasus hukum baru nanti," tandas kader PDIP yang menolak namanya disebutkan di media ini.

Dia menyebutkan, penyertaan modal untuk PT KS itu sendiri masih jadi perdebatan panjang. Untuk mencegah cairnya dana Rp 43,4 miliar untuk Pilkada Karangasem 2015 nanti, pihaknya telah menyampaikan masalah ini ke Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto.

"Tapi, sekarang tergantung Fraksi PDIP di DPRD Karangasem saja. Mudah-mudahan, Fraksi PDIP DPRD Karangasem bisa menggagalkannya. Yang jelas, masalah ini sudah kita sampaikan ke DPP PDIP supaya diantisipasi. Cara-cara memainkan dana APBD seperti ini penting dicegah, supaya pesta demokrasi terjaga kualitasnya," katanya.

Sementara, Ketua Tim Pemenangan Cabu-Cawabup Karangasem dari PDIP, I Wayan

Sutena, mengatakan pihaknya mendengar informasi soal permainan dana penyertaan modal di PT KS tersebut. Menurut Sutena, pihaknya masih memperdalam masalah ini. Dari data-data yang ada, dana sebanyak itu tidak relevan jadi penyertaan modal ke PT KS, apalagi mau diketok palu jelang Pilkada. "Kita atensi, karena penyertaan modal ini sangat politis," ujar politisi PDIP asal Desa Tegak, Kecamatan Klungkung ini, Minggu kemarin.

Ditegaskan Sutena, pihaknya bersama tim sedang bergerak untuk bisa mencegah terjadinya penggunaan amunisi Pilkada berbalut dana APBD tersebut. "Kami minta masyarakat juga turut mencegah, supaya uang negara bisa diselamatkan. Kita berharap Fraksi PDIP DPRD Karangasem memendingnya. Kenapa harus buat PT KS? Kenapa tidak ke Perusda dan BUMD saja dimasukkan dana itu?" ujar Sutena.

"Lagian ini, kan masih Penjabat Bupati yang tangani. Tunggu saja nanti ada Bupati Karangasem terpilih (melalui Pilkada 2015), baru bentuk PT Karangasem Sejahtera," lanjut Sutena yang mantan Ketua DPRD Klungkung 1999-2004 dan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali

2004-2009.

Sementara itu, mantan Bupati Karangasem (2005-2010 dan 2010-2015) yang juga Ketua DPD II Golkar Karangasem, I Wayan Geredeg, belum bisa diminta komentarnya terkait penyertaan modal Rp 217 miliar di PT KS yang dimasalahkan kubu PDIP, karena dicurigai jadi amunisi untuk Pilkada 2015. Saat dihubungi NusaBali per telepon, Minggu kemarin, ponselnya dalam keadaan tidak aktif.

Sedangkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Karangasem, I Gede Dana, belum bisa dikonfirmasi terkait dengan langkah fraksinya terkait dana penyertaan modal di PT KS tersebut. Saat dihubungi melalui telepon, Minggu kemarin, ponsel Ketua DPC PDIP Karangasem ini juga bernada mailbox.

Sebaliknya, Penjabat Bupati Karangasem IB Ngurah Arda dihubungi menyebutkan memang ada rencana penyertaan modal di PT KS yang diposkan dalam Ranperda APBD Perubahan. Hanya saja, agenda paripurnanya belum pasti, karena masih ada tarik ulur. "Saya mau cek dulu jadwalnya. Data pasti berapa anggarannya juga saya tidak ingat," tegas IB Ngurah Arda. **nat**

Edisi : Senin, 3 Agustus 2015

Hal : 1 dan 15



Seltim Terancam Krisis Air Bersih

PDAM dapat jatah air dari Embung Telaga Tunjung sebanyak 120 liter per detik, tetapi baru bisa digunakan sebanyak 20 liter per detik.

TABANAN, NusaBali

Sejumlah desa di Kecamatan Selemadeg Timur (Seltim), Tabanan, dikhawatirkan mengalami kekeringan dan krisis air bersih dari layanan PDAM

saat memasuki musim kemarau ini. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, saat musim kemarau, Seltim selalu mengalami krisis air bersih.

Direktur PDAM Tabanan, Ida Bagus Oka Sedana mengatakan, saat ini ketersediaan air di sumber baku PDAM masih stabil meski sudah ada penyusutan di beberapa sumber mata air. Krisis air bersih akan terjadi memasuki musim kemarau di bulan Oktober nanti terutama pada daerah sulit air di Seltim.

Dikatakan, wilayah Seltim masuk dalam pelayanan Unit Kerambitan yang kini sudah melayani 10.000 SR (sambungan rumah).

"Untuk di pelayanan unit Kerambitan, sumber baku airnya ada lima dan pada musim kemarau bisa menyusut 60 persen," jelas Oka Sedana, Minggu (3/8).

Dikatakan, idealnya untuk pelayanan maksimal, Unit Kerambitan membutuhkan debit air sebanyak 70 liter per detik. Pada musim kemarau, debit air tersebut bisa kurang dari angka itu sehingga mengganggu pelayanan.

"Kurang dari lima liter per detik saja sudah terjadi kekeringan," ujar Oka Sedana. Salah satu sumber air unit Kerambitan adalah Embung Telaga Tunjung yang ada di Desa Timpag.

PDAM mendapatkan jatah

air dari Embung Telaga Tunjung sebanyak 120 liter per detik. Tetapi PDAM baru bisa menggunakan jatah tersebut sebanyak 20 liter per detik.

"Kapasitas PDAM dalam menggunakan air di Embung Telaga Tunjung baru 20 liter per detik. Itu pun belum maksimal. Sebab, rata-rata debit yang dipakai saat ini kurang lebih masih 16 liter per detik," paparnya. Dijelaskan, belum maksimalnya pemakaian debit air PDAM di unit Kerambitan disebabkan jaringan yang kurang dan kecil serta terkendala support pemompaan.

Meski demikian layanan SR di wilayah ini terus bertambah

dengan adanya perumahan-perumahan baru seperti di wilayah Banjar Mandung, Desa Sembung Gede, Kerambitan.

Mengatasi kekeringan di Selemadeg Timur, PDAM akan melepas sisa kuota dari unit layanan kota jika masih tersedia.

"Tetapi neraca air di kota pun pas-pasan. Jadi tidak selalu bisa melempar sisa kuota dari kota ke unit Kerambitan," terangnya. Ia berharap bisa meningkatkan layanan PDAM.

Ke depan, untuk ketersediaan bahan baku air disiapkan oleh Pemkab setempat sehingga PDAM fokus pada peningkatan layanan dalam hal ini penyediaan jaringan air ke masyarakat. **cr55**

Edisi : Senin, 3 Agustus 2015

Hal

: 7



Undiksha Bentuk Tim Penasehat Hukum ✓ ★ Dampingi Dua Stafnya yang Jadi Tersangka Korupsi

DENPASAR, NusaBali

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja resmi membentuk tim penasehat hukum untuk mendampingi dua stafnya yaitu Wayan Suarsa dan I Gusti Putu Sugiwinatha yang kini menjadi tersangka dalam kasus mark up lahan untuk pembangunan Gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha di Jineng Dalem, Buleleng.

Sebelumnya, Suarsa yang merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan sudah menjalani penahanan didampingi kuasa hukumnya, Adris Sulaiman Manalu. Namun karena Undiksha sudah membentuk tim penasehat hukum, Adris akhirnya mengundurkan diri. "Saya sudah resmi mengundurkan diri karena sudah ada tim penasehat hukum dari Undiksha yang akan mendampingi," jelasnya, kemarin.

Berdasar informasi yang didapat di Kejati Bali, penunjukan para pengacara baru yang mendampingi Suarsa dan Sugiwinatha dengan surat keterangan dengan Nomor: 2325/UN.48/PP/2015. Tiga pengacara tersebut adalah, Made Sudana, Nyoman Sardana dan Nyoman Karsana. Surat keterangan yang juga merupakan penunjukan para pengacara tersebut ditandatangani oleh Rektor Dr I Nyoman Jampel, MPd pada (13/7) lalu.

Dalam kasus ini, kelima tersangka yaitu I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen), I Nyoman Mustiara (makelar tanah) Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha) dan I Dewa Komang Indra (makelar tanah) melakukan mark up harga tanah dari harga Rp 6,5 juta per are menjadi Rp 18 juta per are. Parahnya lagi, tanah yang digunakan untuk kampus Undiksha ini baru dikuasakan menjual oleh kelima tersangka. Lalu tanah ini akhirnya dilunasi setelah alokasi dana Rp 7 miliar untuk pengadaan lahan ini cair. Dari perhitungan inilah ada kerugian negara mencapai Rp 3 miliar. **rez**

Edisi : Senin, 3 Agustus 2015

Hal : 3